

Penyampaian Hasil 2017

Survei Penilaian Integritas



*Disampaikan dalam acara Sosialisasi
Program Penilaian Integritas pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, 21 November 2018*

**Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian Bidang Pencegahan**



RUANG LINGKUP

SPI 2017 pada 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
6 (enam) Kementerian/lembaga, 15 (lima belas) pemerintah provinsi, dan 15 (lima belas) pemerintah kabupaten/kota yang tercakup dalam survei ini

Kementerian/Lembaga

1. Mahkamah Agung
2. Kepolisian RI
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Perhubungan
5. Kementerian Keuangan (DJBC)
6. Badan Pertahanan Nasional

Pemerintah Provinsi

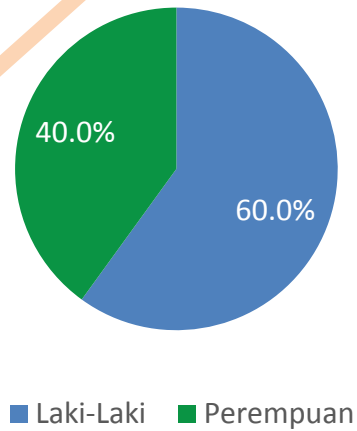
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Provinsi Aceh | 11. Tenggara Timur |
| 2. Provinsi Sumatera Utara | 12. Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Provinsi Sumatera Barat | 13. Provinsi Sulawesi Tengah |
| 4. Provinsi Riau | 14. Provinsi Maluku Utara |
| 5. Provinsi Jambi | 15. Provinsi Papua Barat |
| 6. Provinsi Bengkulu | 16. Provinsi Papua |
| 7. Provinsi Kepulauan Riau | |
| 8. Provinsi Jawa Barat | |
| 9. Provinsi Banten | |
| 10. Provinsi Nusa Tenggara Timur | |

Pemerintah Daerah

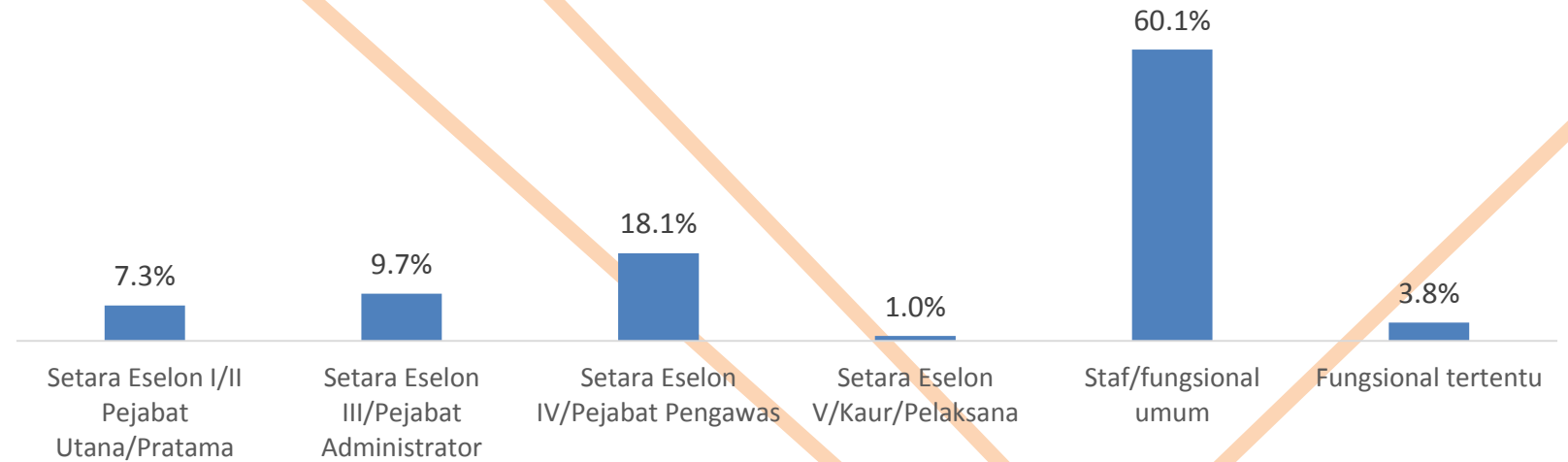
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Kota Banda Aceh | 13. Kota Samarinda |
| 2. Kabupaten Deli Serdang | 14. Kota Palu |
| 3. Kota Padang | 15. Kota Makassar |
| 4. Kota Pekanbaru | |
| 5. Kota Bengkulu | |
| 6. Kabupaten Klaten | |
| 7. Kota Madiun | |
| 8. Kota Tangerang | |
| 9. Kabupaten Badung | |
| 10. Kota Mataram | |
| 11. Kota Palangkaraya | |
| 12. Kota Banjarmasin | |

PROFIL RESPONDEN INTERNAL

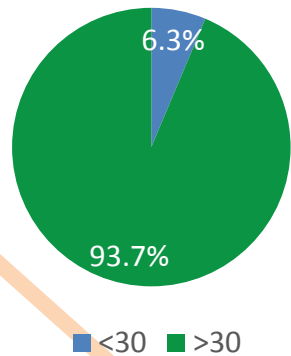
Jenis Kelamin



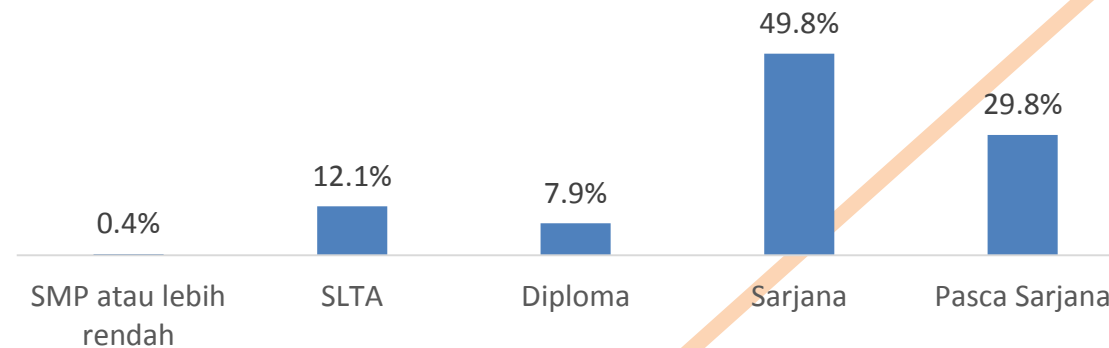
Jabatan



Usia



Pendidikan Terakhir

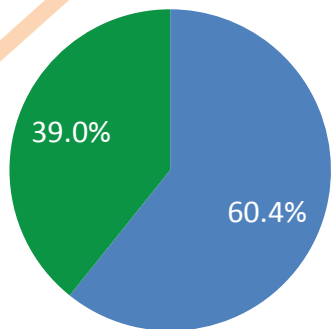


Responden Internal didominasi oleh staf/fungsional umum (60.1%) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan usia lebih dari 30 tahun (93.7%). Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah sarjana (49.8%).

N=2084

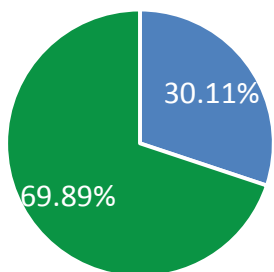
PROFIL RESPONDEN EKSTERNAL

Jenis Kelamin



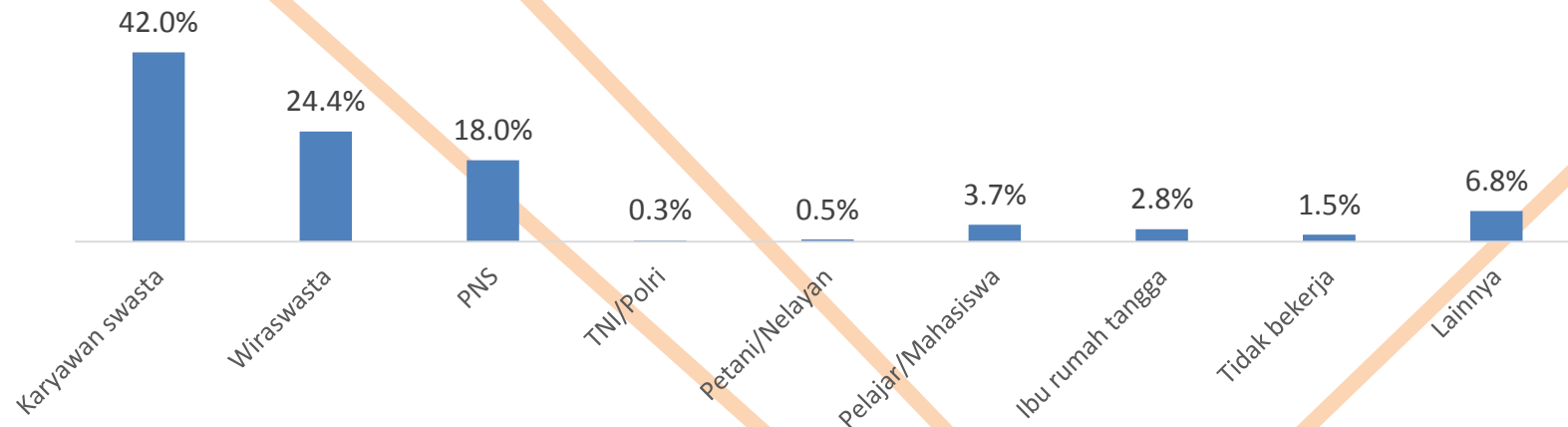
■ Laki-Laki ■ Perempuan

Usia

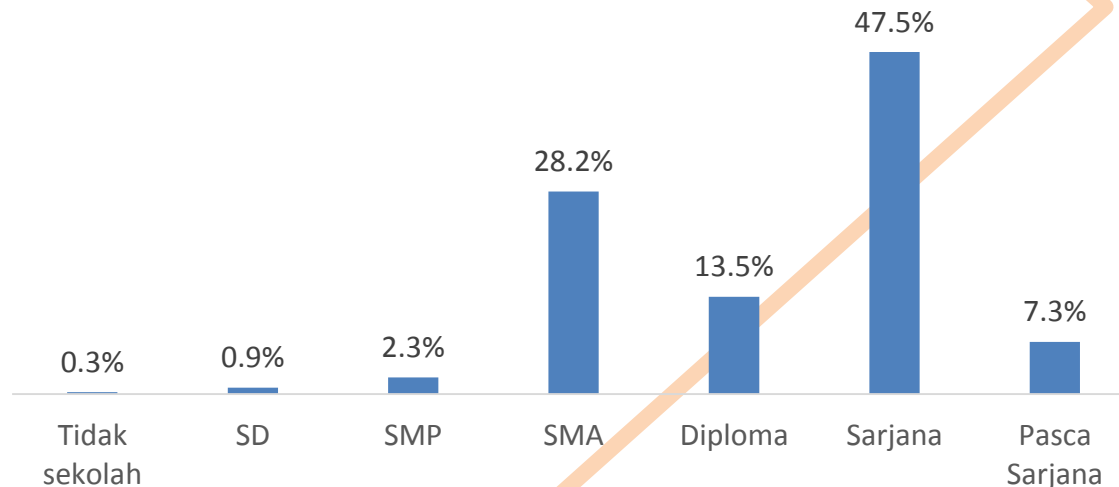


■ <=30 ■ >30

Pekerjaan



Pendidikan Terakhir

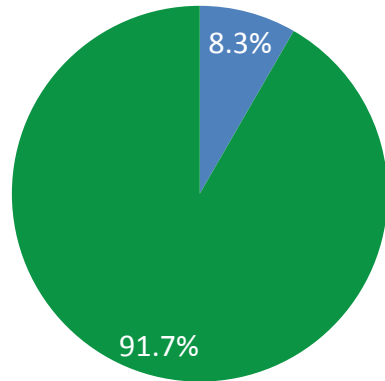


N=2142

Responden Eksternal didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita (60.4%). Karyawan swasta merupakan responden yang mendominasi responden eksternal (42%). Responden eksternal juga didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir sarjana (47.5%).

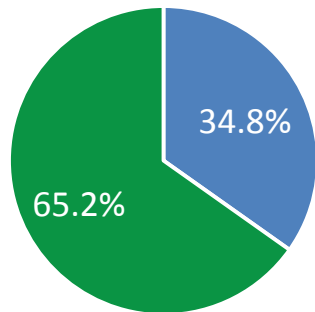
PROFIL RESPONDEN EKSPER

Usia



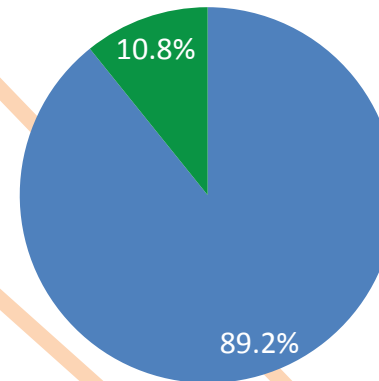
■ <30 ■ >30

Pendidikan Terakhir



■ <=S1 ■ >S1

Jenis Kelamin



■ Laki-Laki ■ Perempuan

Responden Ekspert pada 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah didominasi oleh pria (89.2%). Selain itu, responden ekpert juga didominasi oleh responden berusia lebih dari 30 tahun (91.7%) dan responden yang memiliki pendidikan terakhir minimal Sarjana (65.2%).

N=204

Hasil SPI 2017

GAMBARAN UMUM

Survei Penilaian **Integritas**



Gambaran Umum Permasalahan Integritas

CALO

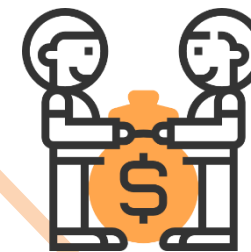


Sekitar **17,61 persen** responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo. Muncul disemua lembaga peserta



Sekitar **20,11 persen** responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai

GRATIFIKASI



3 dari **10** Responden Pengguna layanan melihat / mendengar pegawai menerima suap / gratifikasi . Muncul disemua peserta

NEPOTISME

SUAP PROMOSI

Sekitar **4,08 persen** responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Muncul di 82% peserta lembaga



Sekitar **30 persen** responden internal cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya



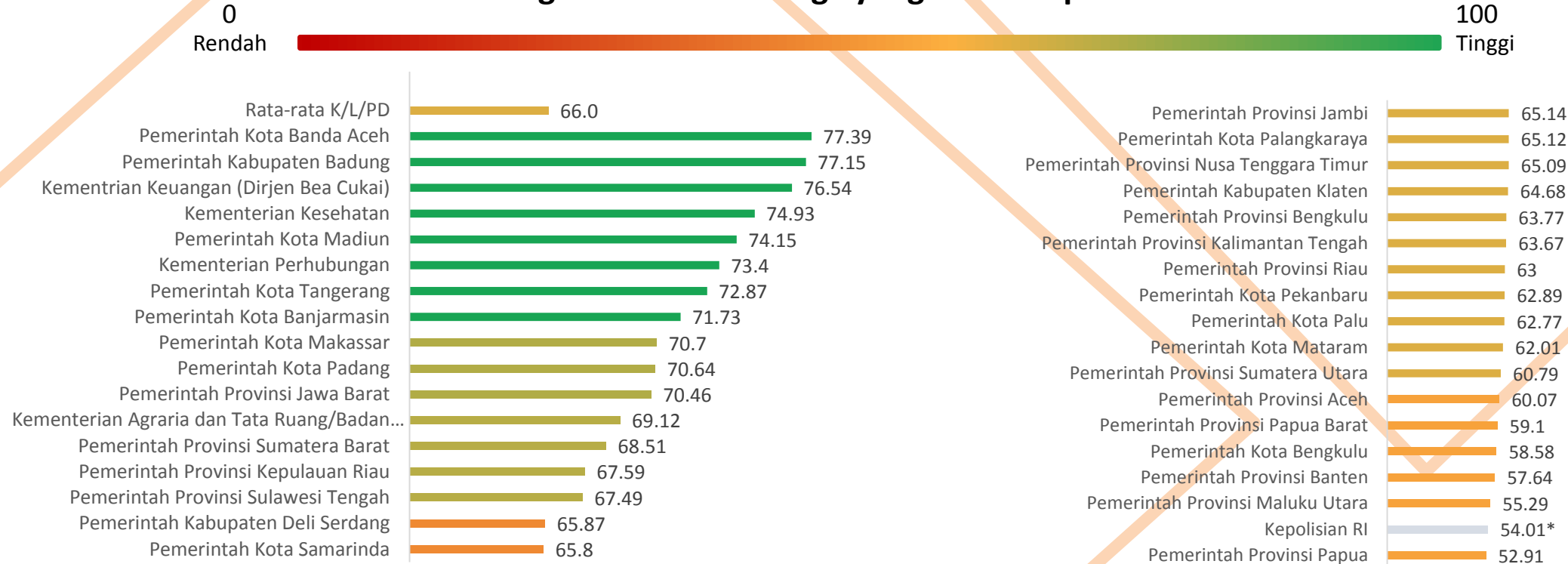
2 dari **10** pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diber sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir



SISTEM ANTI KORUPSI

Hasil Survei Penilaian Integritas 2017

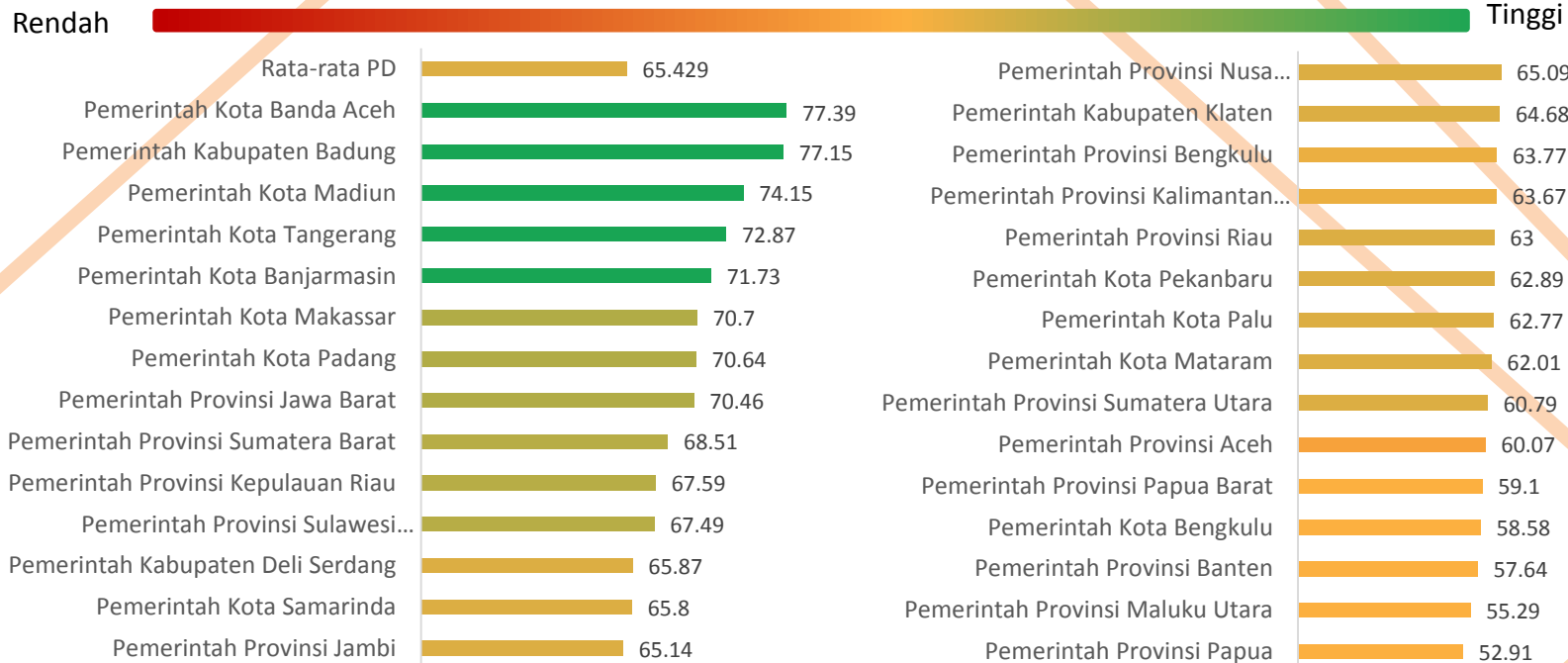
Indeks Penilaian Integritas di 36 Lembaga yang Disurvei pada SPI 2017



1. Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh indeks integritas tertinggi dan Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan Nilai Terendah pada tahun 2017;
2. Nilai Indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan pun.

Hasil Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah 2017


Indeks Penilaian Integritas 30 (Tiga Puluh) Pemerintah Daerah pada SPI 2017



Indeks Integritas Pemerintah Daerah Berdasarkan Wilayah



1. Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Badung mendapatkan nilai pertama dan kedua tertinggi kategori Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten);
2. Terdapat perbedaan angka indeks integritas antara Pemerintah Daerah bagian barat, tengah dan timur dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk Indonesia bagian timur.

 Cukup besarnya angka partisipasi dari Pemerintah Daerah dapat menggambarkan tingkat integritas pemerintah daerah di Indonesia. Walaupun partisipasi Pemerintah Provinsi/Daerah lebih tinggi daripada Kementerian, namun jumlahnya baru sebanyak 30 (tiga puluh) dari ratusan Pemerintah Kota/Provinsi/Kabupaten di Indonesia. Kedepan diharapkan jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dapat lebih banyak dan terus bertambah sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mencerminkan kondisi yang ada.

Survei Penilaian Integritas

Gambaran Dimensi Penilaian Integritas

**BUDAYA ANTI
KORUPSI**



**PENGELOLAAN
ANGGARAN**



**PENGELOLAAN
SDM**



**SISTEM ANTI
KORUPSI**



Hasil SPI 2017

**BUDAYA ORGANISASI
ANTI KORUPSI**

Survei
Penilaian
Integritas



Budaya Organisasi



Tahukah Anda bahwa:

- 1) 1 dari 10 pegawai melihat/mendengar rekannya menerima suap/gratifikasi;
- 2) 3 dari 10 Pengguna Layanan melihat/ mendengar pegawai instansi menerima suap/ Gratifikasi;
- 3) Kesaksian penerimaan Suap/Gratifikasi muncul di semua instansi peserta di SPI 2017;
- 4) Hal ini menandakan bahwa risiko korupsi dapat terjadi di semua lembaga.



Tahukah Anda bahwa:

- 1) 17% pegawai melihat /mendengar keberadaan perantara di instansi (unit kerja).;
- 2) Keberadaan Perantara muncul di semua (35/35) instansi yang mengikuti SPI 2017;
- 3) Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena calo/perantara masih merupakan hal yang umum dalam layanan publik.

Pengalaman Penerimaan Gratifikasi/ Suap

(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)



“18% Responden Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pernah melihat/mendengar rekannya menerima suap/gratifikasi dengan kecenderungan meningkat”

No	Pemerintah Daerah	2017 (%)	2016 (%)
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	18 ↑	14
2	Pemerintah Provinsi Bengkulu	15	-
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	15	-
4	Pemerintah Provinsi Papua	15 ↑	6
5	Pemerintah Kota Pekanbaru	14	-
6	Pemerintah Kota Samarinda	13	-
7	Pemerintah Provinsi Riau	11	11
8	Pemerintah Provinsi Banten	10 ↓	21
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	8	-
10	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	8	-

Pengalaman Pemerasaan Pengguna Layanan

(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)

“18% Responden Pengguna layanan Pemerintah Kota Bengkulu menyatakan pernah diminta uang oleh pegawai”

No	Pemerintah Daerah	2017 (%)	2016 (%)
1	Pemerintah Kota Bengkulu	18	-
2	Pemerintah Provinsi Aceh	16 	12
3	Pemerintah Provinsi Banten	16 	2
4	Pemerintah Provinsi Papua	15 	4
5	Pemerintah Kota Pekanbaru	13	-
6	Pemerintah Provinsi Riau	10 	8
7	Pemerintah Kota Samarinda	10	-
8	Pemerintah Kota Palu	10	-
9	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	9	-
10	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	8	-

Persepsi Risiko Konflik Kepentingan – Pemanfaatan Fasilitas Kantor (10 Pemerintah Daerah Tertinggi)

No	Pemerintah Daerah	2017
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	55
2	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	50
3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	46
4	Pemerintah Provinsi Bengkulu	45
5	Pemerintah Provinsi Jambi	41
6	Pemerintah Kota Palu	41
7	Pemerintah Provinsi Riau	40
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	38
9	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	38
10	Pemerintah Provinsi Papua Barat	38

“55% Responden Pegawai Pemprov NTT cenderung percaya rekannya pernah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi ”

Pengalaman Pegawai terkait Kecenderungan Penyalahgunaan Wewenang oleh Atasan

(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terkait persentase pegawai yang pernah melihat/ mendengar atasan memberikan perintah melanggar”

No	Pemerintah Daerah	2017	2016
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	13	-
2	Pemerintah Provinsi Papua Barat	13 	8
3	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	11	
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	10 	8
5	Pemerintah Provinsi Papua	10 	18
6	Pemerintah Provinsi Banten	8 	15
7	Pemerintah Provinsi Riau	6 	3
8	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	6	
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	6	
10	Pemerintah Kabupaten Klaten	6	

Pengelolaan SDM

Hasil SPI 2017

Survei
Penilaian
Integritas



Pengelolaan SDM



Tahukah Anda bahwa:

- 1) 30% Pegawai cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di instansinya;
- 2) Masih ada pegawai yang melihat/mendengar rekan kerja memberikan suap/gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan karir (4%);
- 3) Suap/Gratifikasi kebijakan karir muncul di 82 % (29/35) instansi peserta SPI 2017;
- 4) Korupsi dalam pengelolaan SDM masih menjadi tantangan dalam menciptakan birokrasi yang bersih di Indonesia.

Persepsi Suap/Gratifikasi dalam Promosi dan Mutasi (10 Pemerintah Daerah Peserta Tertinggi)

“51% Pegawai Pemkab Klaten Layanan mempercayai bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di instansinya”

No	Instansi	2017 (%)
1	Pemerintah Kabupaten Klaten	51
2	Pemerintah Kota Pekanbaru	45
3	Pemerintah Provinsi Riau	45
4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	45
5	Pemerintah Kota Palangkaraya	45
6	Pemerintah Provinsi Banten	43
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	41
8	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	40
9	Pemerintah Provinsi Papua	38
10	Pemerintah Kota Bengkulu	38

Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK

Pengalaman Suap/Gratifikasi dalam Promosi dan Mutasi

“11% pegawai Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau melihat/mendengar suap/gratifikasi kebijakan karir dengan kecenderungan meningkat”

No	Instansi	2017	2016
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	11 ↑	6
2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	11 ↑	8
3	Pemerintah Provinsi Jambi	10	-
4	Pemerintah Provinsi Banten	10 ↑	3
5	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	10	-
6	Pemerintah Kabupaten Klaten	10	-
7	Pemerintah Kota Samarinda	8	-
8	Pemerintah Provinsi Riau	6	-
9	Pemerintah Provinsi Papua Barat	6 ↑	1
10	Pemerintah Provinsi Papua	6 ↑	6

Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK

Sistem Anti Korupsi

Hasil SPI 2017

Survei
Penilaian
Integritas



Sistem Antikorupsi

Tahukah Anda bahwa:

- 1) 8% Responden pegawai menyatakan masih ada pegawai yang melakukan korupsi namun tidak ditindak;
- 2) 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapatkan hukum sesuai aturan yang ada;
- 3) Hal ini terjadi di 40% instansi peserta SPI 2017;
- 4) Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan pelanggaran korupsi di lembaga masih menjadi isu yang harus diselesaikan.



Tahukah Anda bahwa:

- 1) 22% Pegawai cenderung tidak percaya pelapor praktik korupsi tidak akan dihambat karirnya, tidak akan dikucilkan dan tidak diberi sanksi;
- 2) 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja pada dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir;
- 3) Hal ini mengindikasikan masih adanya kejadian pegawai yang tidak dilindungi bahkan dihukum ketika melaporkan korupsi di instansinya.



Persepsi Perlindungan Pelapor

“38% Responden Pegawai Pemprov Sulawesi Tengah cenderung tidak percaya bahwa setiap pegawai yang melaporkan adanya praktik korupsi tidak akan dikucilkan, tidak akan diberi sanksi, karirnya tidak akan dihambat, dan sejenisnya”

No	Instansi	2017
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	38
2	Pemerintah Provinsi Riau	33
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	33
4	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	33
5	Pemerintah Provinsi Bengkulu	31
6	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	31
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	30
8	Pemerintah Provinsi Papua Barat	30
9	Pemerintah Provinsi Banten	28
10	Pemerintah Kota Bengkulu	26

Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK

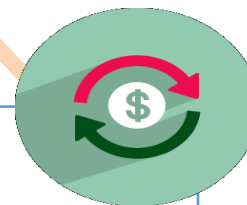
Pengelolaan Anggaran

Hasil SPI 2017

Survei
Penilaian
Integritas



Pengelolaan Anggaran



Tahukah Anda bahwa:

- 1) 17% Pegawai percaya bahwa terjadi penggelembungan anggaran di instansinya;
- 2) Masih terdapat responden yang mendengar atau melihat keberadaan penyelewengan anggaran (5,90%)
- 3) Risiko muncul di 80% Instansi Peserta Survei;
- 4) Hal ini mengindikasikan kebutuhan untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan anggaran sebagai salah satu fokus utama pencegahan korupsi.

Persepsi Terhadap Markup Anggaran

“35% Responden Pegawai Pemprov Sumatera Utara, Papua Barat dan Kota Palangkaraya Percaya bahwa terdapat markup anggaran di instansinya”

No	Instansi	2017
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	35
2	Pemerintah Provinsi Papua Barat	35
3	Pemerintah Kota Palangkaraya	35
4	Pemerintah Provinsi Banten	30
5	Pemerintah Provinsi Riau	26
6	Pemerintah Kota Bengkulu	26
7	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	25
8	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	25
9	Pemerintah Provinsi Papua	25
10	Pemerintah Kabupaten Klaten	25

Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK

Pengalaman Penyelewengan Perjalanan Dinas

“26% Responden Pegawai Pemprov Kepri pernah melihat/mendengar Pegawai di unit kerja melakukan perjalanan dinas fiktif, atau membuat kwitansi hotel fiktif atau biaya transportasi fiktif”

No	Instansi	2017
1	Pemerintah Provinsi Riau	26
2	Pemerintah Provinsi Papua	25
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	23
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	18
5	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	16
6	Pemerintah Provinsi Papua Barat	15
7	Pemerintah Provinsi Banten	13
8	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	11
9	Pemerintah Provinsi Jambi	10
10	Pemerintah Provinsi Aceh	8

Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK

Kesimpulan

- Indeks Integritas Tahun 2017 berkisar antara 52,91 hingga 77,39.
- Permasalahan integritas internal yang masih sering ditemui adalah nepotisme dalam penerimaan pegawai (20,11%) dan keberadaan calo (17,61%).
- Permasalahan integritas eksternal yang masih sering ditemui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan (6,77%). Selain itu, masih ada responden yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan (5,60%).

Rekomendasi

- Perbaiki budaya organisasi melalui
 - Pengelolaan konflik kepentingan dan penguatan kode etik → Memperkuat aturan dan implementasi pengelolaan konflik kepentingan dan kode etik di KL dan PD.
 - Peningkatan Layanan Publik diantaranya melalui TIK (online) untuk mengurangi peran perantara.
 - Peningkatan Kesadaran resiko korupsi di tingkat organisasi →
 - Pelatihan untuk tingkatan Pimpinan (struktural) dan inspektorat untuk mengidentifikasi dan mengatasi korupsi. Menghindari penyalahgunaan wewenang.
 - Mendorong SPI diadopsi di KL dan PD melalui penilaian mandiri.
- Penguatan Sistem Anti Korupsi
 - Penegakan Hukum dan Konsistensinya
 - Penguatan Whistle Blowing system (perlindungan terhadap pelapor) untuk meningkatkan partisipasi pelapor
- Pengelolaan SDM
 - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pengelolaan SDM termasuk untuk pegawai honorer/pekerja dengan kontrak waktu tertentu
- Pengelolaan Anggaran
 - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terutama di PBJ (koordinasi dengan Korusupgah KPK)

Rekomendasi

- Setiap Peserta Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga 2017 menindaklanjuti dengan kegiatan tindak lanjut (rencana aksi) yang akan dilakukan 2019 untuk menurunkan resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.
- Rencana aksi dapat diintegrasikan dengan Rencana Aksi yang sudah dikembangkan bersama Korsupgah KPK. Penyampaian rencana aksi diharapkan dapat diterima KPK pada Februari 2019.
- Upaya-upaya yang sudah berhasil dijalankan dan menunjukkan dampak perbaikan terkait kegiatan ini dapat dilaporkan ke KPK.
- Rencana Aksi dan Tindak Lanjutnya akan disampaikan ke publik dalam bentuk tampilan di situs KPK (JAGA, ACCH) ataupun didorong disitus masing masing Kementerian/Pemerintah Daerah.
- KPK akan mengundang dan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan untuk melihat jalannya rencana aksi dan janji perbaikan yang sudah diberikan.

SELENGKAPNYA MENGENAI HASIL DAPAT DILIHAT DI KPK.GO.ID



Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

TERIMA KASIH

